

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan memiliki urgensi yang sangat penting dalam memajukan suatu Negara. Kegiatan pembangunan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Pembangunan memberikan banyak manfaat bagi warga negara di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan lain-lain. Pembangunan sangat perlu dilakukan oleh setiap negara agar tercipta kesejahteraan rakyat. Pembangunan akan mempermudah masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pembangunan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan Nugroho dan Rochmin (2004: 15) pembangunan dapat diartikan sebagai “Suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi”.

Pembangunan di Indonesia sudah dilaksanakan dan relatif berhasil namun masih ada muncul kemiskinan. Secara umum, pada periode 2010–September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, perkecualian pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, dan September 2020. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin

pada periode September 2013 dan Maret 2015 disebabkan oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia.

Tabel 1
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Malang Pada Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Orang)	Persentase Penduduk Miskin
2019	246,6	9,47
2020	265,56	10,15
2021	276,58	10,5

Sumber : BPS Kabupaten Malang (2022) diolah oleh penulis.

Sementara itu di Kabupaten Malang diketahui dari tabel di atas bahwa, penduduk miskin pada tahun 2019 di angka 246,6 orang atau 9,47 persen , sementara pada 2020 naik 18,96 ribu orang atau sebesar 0,68 persen poin terhadap tahun 2019 ke angka 265,56 ribu orang, kenaikan kembali tercatat pada 2021 meningkat 0,35 persen poin atau 11,02 ribu orang terhadap tahun 2020 ke angka 276,58 ribu orang.

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Malang miskin selama periode Maret 2021 antara lain :

1. “Aktifitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi covid-19.
2. Dalam upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka pencegahan perluasan covid- 19, masyarakat di Kabupaten Malang masih banyak berdiam diri di rumah.” BPS Kabupaten Malang (2022)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan, telah banyak program yang dibuat untuk mengatasi masalah program-program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Beras Untuk Masyarakat Miskin (RASKIN). Namun angka kemiskinan masih bertambah hal ini disebabkan oleh maladministrasi, salah satunya yang menjadi masalah di dalam Pemerintah Pusat maupun Daerah yaitu perbedaan sumber data dari berbagai elemen pemerintah.

“Untuk memastikan bahwa berbagai bantuan seperti Bansos, PKH, Sembako, Prakerja, dan subsidi lainnya tepat sasaran untuk orang miskin, diperlukan data kemiskinan yang akurat, dan konsisten. Sampai saat ini, ada tiga sumber data kemiskinan: Biro Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko KMK) saat ini juga mengeluarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai bagian dari tugasnya.” (Djuanda, *Pentingnya Data Presisi dalam Penanggulangan Kemiskinan* 2023).

Dengan sumber data kemiskinan seperti ini akan berdampak terhadap ketidak-tepatan sasaran berbagai bantuan kepada orang miskin dan akhirnya pengentasan kemiskinan tidak terealisasi dengan baik. Data

kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

Dibutuhkan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah agar mampu menyelesaikan persoalan maladministrasi ini, yang bertujuan agar mampu mengelola data tunggal masalah angka kemiskinan di Indonesia dan memastikan bahwa program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran serta kementerian atau lembaga terkait perlu memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk membantu proses pemutakhiran data, Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bahwa data terpadu merupakan “Data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan, dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial” (Kemensos, 2021).

Desa di seluruh Indonesia diberi tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) untuk pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT). Dengan SIKS-NG, pemerintah dapat melakukan update data kesejahteraan sosial dengan lebih cepat dan lebih mudah, diharapkan mampu mempermudah dalam pelayanan

pemerintah terhadap masyarakat, sehingga mampu menjawab berbagai persoalan di masyarakat terkait pengusulan data yang tidak sesuai dan tidak tepat sasaran.

Desa Sananrejo sendiri sudah mulai menggunakan program aplikasi SIKS-NG dari tahun 2019 dan memberikan efek yang cukup baik karena bantuan kepada masyarakat kurang mampu lebih terarah, karena berdasarkan data yang ada di program aplikasi SIKS-NG. Pelaksanaan program aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG) di Desa Sananrejo diyakini dapat mencatat penduduk miskin secara akurat. Data kemiskinan yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian ditetapkan oleh Menteri Sosial sebagai data terpadu yang dapat digunakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah lainnya. Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

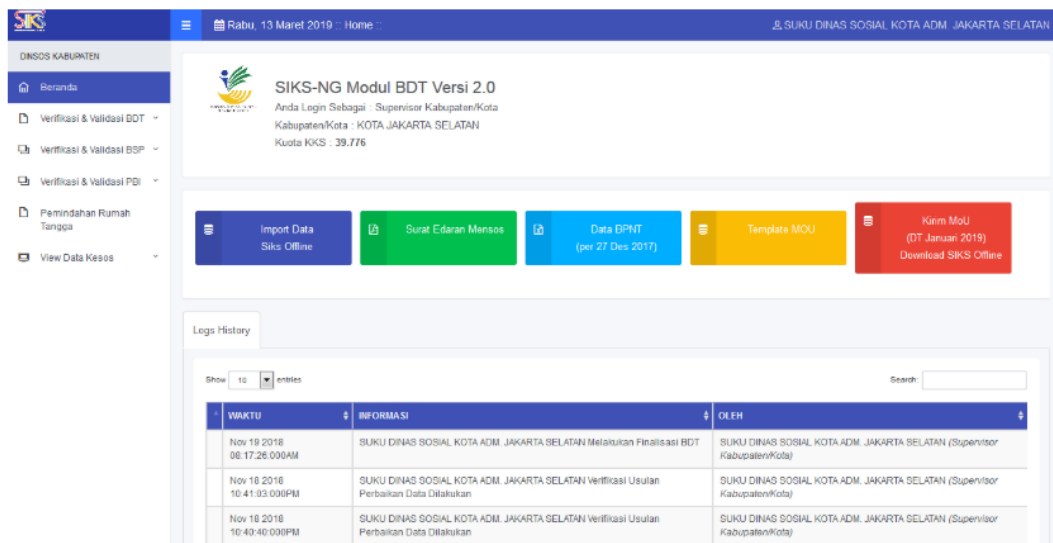
Proses usulan data aplikasi SIKS-NG dapat diajukan melalui beberapa cara, antara lain melalui musyawarah kelurahan/desa atau nama lainnya yang berasal dari ketua rukun tetangga, kepala dusun, lurah/kepala desa/nama lain, potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial dan/atau pendaftaran mandiri kepada perangkat daerah atau kelurahan/nama lainnya . Aplikasi SIKS-NG di Desa dikelola oleh kasi kesejahteraan desa. Sebagai operator desa, Kasi Kesejahteraan

menggunakan aplikasi ini untuk memverifikasi dan memvalidasi data penduduk, termasuk data penduduk miskin. Menurut hasil wawancara awal bersama ibu Asrurin Nafsiyah sebagai operator desa di Desa Sananrejo dalam pengelolaannya :

“Aplikasi ini digunakan untuk mengolah dan mengupdate data Basis Data Terpadu (Rumah Tangga Sasaran) dan Kartu Keluarga Sejahtera. Data diperbarui secara berkala karena perubahan yang terjadi di lapangan. SIKS-NG mengelola perbaikan data lapangan, yang digunakan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan penyebaran bantuan sosial dan subsidi yang tepat sasaran.”

Gambar 1

Tampilan Halaman Beranda Aplikasi SIKS-NG



Sumber : Kemensos (2019: 9) diolah oleh penulis.

Dalam pelaksanaannya, aplikasi ini terdapat beberapa permasalahan yang ada pada pengolahan data angka kemiskinan, menurut Bapak Dedik Setyobudi sebagai pendamping PKH di Kecamatan Kedungkandang permasalahan tersebut seperti :

1. Banyak data anomali, seperti perbedaan antara Nama dan NIK dengan diaplikasi dan orang yang meninggal tetapi

tidak dilaporkan hal ini membuat pengusulan bantuan tidak tepat sasaran, setidaknya ada 134 data yang perlu diperbaiki.

2. Verifikasi data yang rumit, ketika pengusulan data baru harus menunggu verifikasi kelayakan dari RT, RW, dan Desa melalui musdes dan menunggu kuota tersedia.
3. Keterbatasan layanan, seperti prasarana komputer yang kurang memadai, mengakibatkan terjadinya error dan menghambat saat menginput data.

Peneliti akan menyelidiki seberapa paham operator desa dengan aplikasi SIKS-NG, seberapa siap sarana dan prasarana Desa Sananrejo untuk menerapkan e-government melalui Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG), dan seberapa tepat sasaran yang menjadi target. Peneliti juga akan memastikan bahwa penerapan dan pelaksanaan aplikasi harus sesuai dengan prosedur yang ada. Hal ini dilakukan agar data kemiskinan dapat diverifikasi dengan aman, yang memungkinkan penanganan kemiskinan secara otomatis.

Dengan adanya uraian masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Data Kemiskinan Melalui Aplikasi SIKS-NG (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial di Wilayah Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan data kemiskinan melalui Aplikasi SIKS-NG di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan data kemiskinan melalui Aplikasi SIKS-NG?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan pengelolaan data kemiskinan melalui Aplikasi SIKS-NG di Desa Sananrejo Kecamatan Turen Kabupaten Malang.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan data kemiskinan melalui Aplikasi SIKS-NG.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam Ilmu Administrasi Publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan, khususnya di bidang administrasi tentang Implementasi Aplikasi Kesejahteraan Sosial, serta berkontribusi pada literatur dalam mata kuliah Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan mahasiswa dan meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalah mereka, khususnya yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Penggunaan Aplikasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan kajian referensi dan juga masukan dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat sehingga dapat meningkatkan Pengelolaan dan Penggunaan Aplikasi.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.